

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Demokrasi merupakan sebuah fenomena yang sangat menakjubkan bukan hanya di dalam tataran filsafat politik tetapi dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dikemukakan pula oleh Suseno dalam pengantar buku *Demokrasi : Klasik dan Modern* karya Ravitch dan Thernstrom (2005) :

Salah satu fenomena amat menakjubkan bukan hanya dalam filsafat politik tetapi dalam kesadaran nyata masyarakat adalah pengakuan hampir universal terhadap demokrasi. Meskipun seratus tahun lalu kebanyakan orang di bumi ini belum pernah mendengar apa pun tentang demokrasi, sekarang keabsahan etis dan politis sebuah negara hampir di seluruh dunia diukur pada kadar kedemokratisannya (hlm.vii).

Demokrasi bukanlah hal yang asing di Negara Indonesia, hal ini tercermin dalam kata “permusyawaratan”. Darmodihardjo (1991, hlm. 44) menjelaskan permusyawaratan sebagai suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Di berbagai suku bangsa Indonesia putusan-putusan mengenai kehidupan komunitas juga selalu dirembuk bersama dalam wadah musyawarah mufakat, semua laki-laki dan perempuan dewasa mempunyai hak bicara. Lubis ( dalam Ravitch & Thernstrom, 2005) mengemukakan bahwa :

Sebenarnya nilai-nilai demokrasi bukanlah suatu nilai yang asing dalam budaya Indonesia sejak masa lampau yang jauh dalam sejarah bangsa kita. Demokrasi telah cukup lama tertanam dalam berbagai budaya suku-suku bangsa kita. Ia tercermin kata “musyawarah” dalam pepatah-petitih lama, seperti : “bulat dalam air dalam campuran, bulat kita dalam musyawarah”. Beberapa hak seperti demokrasi rakyat secara ramai-ramai berjemur diri di alun-alun di depan keraton raja dalam masyarakat jawa di masa lampau untuk menuntut keadilan dari sang raja, dan hak rakyat desa untuk meninggalkan desa mereka dan pindah keluar dari kejayaan yang mereka rasa rajanya tidak memberikan keadilan pada mereka, adalah nilai-nilai demokrasi yang telah berkembang di masa feodal yang lampau ini ( hlm.x).

Karena itulah setelah Indonesia merdeka hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Budiardjo (2008, hlm. 126) mengemukakan perkembangan demokrasi sejarah Indonesia dapat dibagi dalam empat masa, yaitu : Masa demokrasi konstitusional (1945-1959), masa demokrasi terpimpin (1959-1965), masa demokrasi pancasila (1965-1998) dan masa reformasi (1998-sekarang).

Selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 1950 terjadi perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat ke bentuk “negara kesatuan” sesuai dengan proklamasi 17 Agustus 1945, kemudian dinyatakan berlaku pula UUDS 1950 yang menganut sistem parlementer dan dimulailah era demokrasi liberal. UUDS 1950 yang berlaku hanya dimaksudkan untuk sementara sampai disusun dan ditetapkan UUD yang tetap, hal ini merupakan tugas dari konstituante bersama dengan pemerintah sesuai dengan ketentuan pasal 134 UUDS 1950.

Tercatat didalam sejarah selama masa berlakunya UUDS 1950 terjadi tujuh kali jatuh banggunya kabinet. Kartaprawira (dalam Mahfud, 2012) menulis tentang ini sebagai berikut :

Sistem pemerintahan parlementer yang diikuti oleh sistem multi partai menimbulkan instabilitas pemerintahan yang amat sangat. Dalam periode ini terdapat tujuh buah kabinet. Ini berarti umur rata-rata kabinet hanyalah lebih kurang 15 bulan saja. Walaupun demikian dapat dicatat adanya kabinet tertentu yang berumur lebih dari 2 tahun. Hal tersebut berarti bahwa terdapat kabinet lainnya yang mempunyai umur kurang dari 15 bulan (sebagai umur rata-rata tadi) (hlm.48).

Jatuh banggunya kabinet telah menimbulkan rasa tidak puas di kalangan politisi Indonesia, selain itu pemberontakan juga bermunculan di berbagai daerah seperti PRRI pada Februari 1958 dan bentuk-bentuk pertentangan yang di dasarkan pada masalah kesukuan dan geografis. Mahfud (2012) dalam bukunya mengemukakan :

Terlihat dengan jelas bahwa krisis politik kala itu merasuk ke berbagai bagian. Di konstituante terjadi perdebatan tentang ideologi negara yang berkepanjangan dan sia-sia. Kekuatan PKI semakin meningkat, pemerintah pusat tidak efektif menangani masalah-masalah di daerah dan perpecahan dwitunggal Soekarno-Hatta yang pada gilirannya telah menyebabkan munculnya gerakan separatis yang betul-betul mengancam keutuhan

republik. Terjadinya krisis politik yang berkepanjangan seperti itu disebabkan oleh kecenderungan sentrifugal sistem multipartai yang dianut (hml.132).

Seperti diketahui Maklumat No. X Tahun 1945 yang berlaku sejak tanggal 3 November, di mana dalam maklumat tersebut menganjurkan perlunya pembentukan partai-partai, yang ternyata mendapat sambutan luas hingga pada waktu itu lebih kurang 40 partai telah lahir di Indonesia. Pada kenyataan bukannya menambah suburnya sistem demokrasi di Indonesia. Buktinya kabinet-kabinet yang ada pada waktu itu tidak pernah bertahan sampai 2 tahun penuh dan terjadi perombakan-perombakan dengan kabinet yang baru.

Demokrasi liberal yang digunakan ketika awal kemerdekaan Indonesia menurut pengamatan Soekarno tidak semakin mendorong Indonesia mendekati tujuan revolusi yang dicita-citakan, yakni berupa masyarakat adil dan makmur, sehingga pada gilirannya pembangunan ekonomi sulit untuk dimajukan, karena setiap pihak baik pegawai negeri dan parpol juga militer saling berebut keuntungan dengan mengorbankan yang lain. Keinginan Presiden Soekarno untuk mengubur partai-partai yang ada pada waktu itu tidak jadi dilakukan, namun pembatasan terhadap partai diberlakukan, dengan membiarkan partai politik sebanyak 10 partai tetap bertahan.

Selanjutnya Konstituante yang bertugas membuat UUD yang tetap belum menghasilkan kata sepakat karena tidak sampai pada 2/3 dukungan suara. Dalam konstituante sendiri dua kubu yang berhadapan (golongan islam dan golongan nasionalis) tetap pada pendiriannya masing-masing, yang satu bersikap memakai rumusan dasar negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu pancasila dan kubu lainnya bertahan dengan sikap memilih islam sebagai dasar negara. Keadaan yang demikian, akhirnya memaksa Soekarno untuk menerapkan “Demokrasi terpimpin” yang dimulai dengan dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Konfigurasi politik pada era demokrasi terpimpin bertolak belakang dengan yang terjadi pada era demokrasi parlementer. Sistem politik demokrasi terpimpin muncul secara resmi setelah konstituante dianggap gagal memenuhi tugasnya menyusun UUD yang tetap, dan dibubarkan dengan Dekrit Presiden

tanggal 5 Juli 1959. Meskipun kesahihan atau pembenaran yuridis konstitusional atas dekrit itu bermacam-macam, karena menurut Pasal 134 UUDS Tahun 1950 Presiden tidak berwenang memberlakukan atau mencabut berlakunya sebuah UUD, tetapi praktiknya dekrit ini diterima dan dianggap final sebagai dasar berlakunya UUD 1945 dan menjadi titik tolak munculnya demokrasi baru yang disebut demokrasi terpimpin.

Demokrasi terpimpin merupakan penolakan terhadap sistem yang berlaku sebelumnya, ketika politik sangat ditentukan oleh politik partai-partai melalui sistem *free flight*. Proses pengambilan keputusan dalam demokrasi terpimpin didasarkan pada musyawarah dan mufakat serta semangat gotong royong di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno yang kemudian menampilkan Presiden Soekarno sebagai penguasa yang otoriter. Bersamaan dengan penjelmaan kepemimpinan otoriter Soekarno, ada dua kekuatan lain yang mengokohkan kekuatan politiknya, yaitu Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia (PKI), sehingga pada masa itu ada tiga kekuatan politik yang saling tarik menarik yaitu Soekarno, Angkatan Darat, dan PKI.

Konsepsi Presiden Soekarno ini didasarkan pada penafsiran “terpimpin” dari isi pembukaan UUD 1945, tepatnya sila keempat Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, dimana “terpimpin” diartikan sebagai terpimpin secara mutlak oleh diri pribadinya dan menciptakan atribut “Pemimpin Besar Revolusi, Panglima Tertinggi Angkatan Perang“, sehingga Presiden menjadi penguasa tertinggi dan mutlak di dalam negara. Di dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa Presiden adalah mandataris MPR. Dengan demikian, Presiden berada dibawah MPR. Namun dalam kenyataannya anggota MPR (S) diangkat berdasarkan penetapan Presiden. Presidenlah yang menentukan apa saja yang akan diputuskan MPR (S).

Hal ini berarti bahwa UUD 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Sebagai akibatnya, terjadi ketidakstabilan kehidupan ketatanegaraan terutama dalam bidang politik. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa tindakan Soekarno yang otoriter seperti menetapkan Manipol (Manifesto Politik) sebagai GBHN (Pen-Pres no. 1 tahun 1960), pembubaran DPR hasil Pemilu (Pen-Pres no. 3 tahun 1960, pembentukan DPR Gotong Royong untuk mengganti DPR hasil

Pemilu tahun 1955 yang dibubarkan (Pen-Pres no 4 tahun 1960 ). Begitu pula dalam penggantian ketua , wakil dan anggota DPR-GR tanpa meminta persetujuan lembaga legislatif yang ada, tetapi menurut keinginan Presiden Soekarno sendiri.

Tindakan Presiden Soekarno yang inkonstitusional ini menimbulkan perpecahan dalam negeri, terutama dengan angkatan bersenjata di bawah Nasution. Soekarno juga memandang Masyumi dan PSI sebagai penghalang kebijaksanaan yang akan diambilnya, apalagi dikaitkan dengan pemberontakan PRRI/Permesta di mana menurut Soekarno militer, Masyumi dan PSI terlalu lemah dalam menangani masalah PRRI tersebut.

Meski diakui bahwa situasi politik pada masa awal demokrasi dipimpin tidak stabil namun untuk mengatakan bahwa Soekarno seorang otoriter diperlukan penelaahan yang lebih mendalam. Namun dapat disimpulkan bahwa tindakan Soekarno dalam menerapkan demokrasi menimbulkan pro dan kontra, begitu juga penilaian terhadap tindakannya.

Berangkat pada pemaparan tersebut menjadi suatu ketertarikan tersendiri bagi penulis untuk membahas mengenai penerapan demokrasi dipimpin pada tahun 1959-1966, bagaimana latar belakang pemikiran tersebut muncul, sejauh mana pengaruh pemikiran politik Ir. Soekarno terhadap kiprah politiknya dan perkembangan bangsa Indoensia, yang kemudian dituangkan dalam skripsi yang berjudul: **“STUDI TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN PRESIDEN SOEKARNO TAHUN 1959 - 1966”**.

Disebabkan karena penerapan demokrasi dipimpin Ir. Soekarno yang dianggap relevan untuk kembali dikaji di era modern ini juga menggali lebih dalam latar belakang pemberlakuannya demokrasi dipimpin karena disamping itu Ir. Soekarno juga memiliki pemikiran tentang sosio-demokrasi. Selain itu juga penulis ingin menemukan analisis terhadap apa saja yang terjadi ketika pemberlakuan demokrasi dipimpin sampai digantikannya lebel demokrasi dipimpin oleh demokrasi liberal.

Penelitian ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan. Penelitian ini berdasar pada konsep demokrasi yang diterapkan oleh pendiri negara Indonesia. Pada dasarnya demokrasi merupakan bidang yang dipelajari dalam Pendidikan Kewarganegaraan.

Ray Adhari Jajuri, 2017

**STUDI TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN PRESIDEN SOEKARNO TAHUN 1959 - 1966**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Walaupun metode penelitian ini menggunakan metode historis dan analisis dokumen dengan teknik penelitian studi literatur, studi kesejarahan hanya dijadikan sebagai alat untuk menyusun skripsi ini karena pemikiran Ir. Soekarno yang akan dikaji berasal dari sumber sejarah, diharapkan metode dan teknik tersebut semakin menambah keunikan dan ciri khas dari skripsi ini.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian penulis ialah bagaimana konsepsi penerapan demokrasi terpimpin Presiden Soekarno pada era demokrasi terpimpin tahun 1959-1966? Mengingat luasnya kajian permasalahan pada penulisan ini, maka penulis membatasi masalah kedalam beberapa rumusan, antara lain:

1. Bagaimana kepemimpinan Ir. Soekarno pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959-1966?
2. Bagaimana pelaksanaan ketatanegaraan pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959-1966?
3. Bagaimana dinamika politik ketika penerapan demokrasi terpimpin tahun 1959-1966?
4. Bagaimana rangkaian peristiwa sejarah yang terjadi ketika penerapan demokrasi terpimpin tahun 1959-1966?
5. Bagaimana nilai-nilai historis dalam konteks Pendidikan demokrasi untuk penguatan Pendidikan Kewarganegaraan?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan kajian secara analisis dan historis tentang penerapan Demokrasi Terpimpin Ir. Sukarno tahun 1959-1966 dan menganalisis struktur ketatanegaraan yang terjadi pada masa itu.

### **2. Tujuan Khusus**

Selain tujuan umum, penelitian ini juga memiliki tujuan yang lebih khusus antara lain:

- a) Untuk menganalisis Kepemimpinan Ir. Sukarno dalam menerapkan demokrasi terpimpin di Indonesia.

- b) Untuk menganalisis pelaksanaan ketatanegaraan pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959-1966
- c) Untuk mengidentifikasi dinamika politik yang terjadi ketika penerapan demokrasi terpimpin tahun 1959-1966
- d) Untuk mengidentifikasi rangkaian peristiwa sejarah yang terjadi ketika penerapan demokrasi terpimpin tahun 1959-1966
- e) Untuk menganalisis nilai-nilai historis dalam konteks Pendidikan demokrasi untuk penguatan Pendidikan Kewarganegaraan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Segi teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka pengembangan keilmuan dalam bidang pendidikan kewarganegaraan, khususnya segi ilmu politik dan menambah tulisan mengenai demokrasi terpimpin Presiden Soekarno pada tahun 1959-1966.

##### **2. Segi Kebijakan**

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bacaan yang sangat bermanfaat bagi pemangku kebijakan dalam melaksanakan tugasnya serta menjadikan bahan pertimbangan dalam menentukan sebuah kebijakan terutama dalam hal demokrasi dan ketatanegaraan.

##### **3. Segi praktis**

###### **a. Penulis**

Bagi penulis penelitian ini berguna sebagai sarana dalam memperluas wawasan keilmuan tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin Presiden Soekarno tahun 1959-1966.

###### **b. Guru / dosen**

Guru diharapkan mampu memahami pelaksanaan demokrasi terpimpin Presiden Soekarno tahun 1959-1966, serta mampu memaknai nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan demokrasi sehingga bisa di transferkan kepada siswa dalam kegiatan pembelajaran.

#### c. Pemerintah

Bagi pemerintah diharapkan mampu memahami dan mempelajari pelaksanaan demokrasi terpimpin Presiden Soekarno tahun 1959-1966 sehingga dalam pelaksanaan pemerintahan tidak mengulangi kesalahan terdahulu dan menjadikan pengalaman terdahulu sebagai pelajaran untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

#### d. Masyarakat

Penulis sangat berharap dari penelitian ini seluruh lapisan masyarakat dapat mengetahui konsep penerapan demokrasi terpimpin Presiden Soekarno serta peristiwa yang terjadi ketika penerapan demokrasi terpimpin Presiden Soekarno. Kemudian mampu mengemban tugas dan mengisi kemerdekaan ini dengan baik dan menjunjung tinggi cita-cita para pendiri bangsa baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam praktek kehidupan bernegara.

### 4. Segi isu serta aksi sosial

Penelitian ini diharapkan dapat mengubah sikap dan perilaku masyarakat Indonesia dalam kegiatan bernegara, khususnya berdemokrasi dengan baik, menghargai pendapat atau hak orang lain serta menghindari konflik yang dapat menimbulkan perpecahan bangsa.

### E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan didalam penyusunan skripsi ini meliputi lima bab, yaitu:

- BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, penjelasan istilah, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Tinjauan pustaka. Pada bab ini diuraikan dokumen-dokumen atau data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian serta teori-teori dan konsep yang mendukung penelitian penulis.

- BAB III : Metodologi penelitian. Pada bab ini penulis menjelaskan metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, serta tahapan penelitian yang digunakan dalam penelitian mengenai konsepsi penerapan Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1966.
- BAB IV : Temuan dan pembahasan. Dalam bab ini penulis menganalisis hasil temuan data tentang konsep Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno yang diberlakukan pada tahun 1959-1966, menganalisis kondisi ketatanegaraan dan situasi politik pada masa demokrasi terpimpin.
- BAB V : Simpulan, implikasi dan rekomendasi. Dalam bab ini penulis berusaha mencoba memberikan simpulan implikasi dan rekomendasi sebagai penutup dari hasil penelitian dan permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam skripsi.